



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT KOMISI IX DPR RI**

**(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))**

---

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 31
Jenis Rapat	: Rapat Kerja & Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: 1. Menteri Kesehatan RI; 2. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN); 3. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); 4. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan; 5. Direktur Utama BPJS Kesehatan.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Kamis, 12 Desember 2019
Pukul	: 14.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Membahas tentang Penundaan Kenaikan Iuran JKN Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III; 2. Membahas Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 termasuk Pengadaan Obat, Alat Kesehatan dan Pengadaan Barang/Jasa bagi Program Prioritas Penanggulangan Stunting.
Ketua Rapat	: Felly Estelita Runtuwene, SE/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto/ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	: A. 33 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Menteri Kesehatan RI, Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad, beserta jajaran; C. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Ir. Tubagus Achmad Choesni, MA, M.Phil, beserta jajaran;

- D. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), DR. Ir. Roni Dwi Susanto, M.Si, beserta jajaran;
- E. Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dr. Chairul Radjab Nasution, M.Kes, beserta jajaran;
- F. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Dr.dr. Fachmi Idris, M.Kes, beserta jajaran.

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan dibuka pukul 14.20 WIB, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN**

1. Komisi IX DPR RI mendukung langkah Kementerian Kesehatan RI, BPJS Kesehatan, dan DJSN untuk memanfaatkan surplus Dana Jaminan Sosial (DJS) sebagai alternatif solusi untuk membayar selisih kenaikan iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III sejumlah 19.961.569 jiwa. Kementerian Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan menjamin per 1 Januari 2020 dapat diimplementasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
2. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan optimalisasi penyerapan anggaran Kementerian Kesehatan RI, Komisi IX DPR RI menyetujui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melibatkan secara menyeluruh Kementerian Kesehatan RI dalam proses pengadaan secara katalog elektronik yang berkaitan dengan kebutuhan obat, alat kesehatan, dan barang yang merupakan program prioritas nasional.

## **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 21.00 WIB.

Jakarta, 12 Desember 2019

KETUA RAPAT/  
KETUA KOMISI IX DPR RI,

Ttd.

FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE  
A-393